

**Kebijakan Pengembangan Koleksi dan Pemanfaatannya di
Perpustakaan Perguruan Tinggi (Analisis Penerapan Kebijakan
Pengembangan Koleksi Perpustakaan Utama Universitas Islam Negeri
Syarif Hidayatullah Jakarta)**

Rahmat Iswanto
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup
E-mail: rahmatiswanto.database@gmail.com

Abstract

The assumption is there are many academic libraries of Indonesia especially under Minister of Religion Affairs (MORA) which hardly meet a demand of their users' needs because their collection management or collection development policies do not prepare well. Actually to create a better collection, an academic library has to plan its collection well. This research has done with a purpose of inspecting a collection development policy of an academic library in Indonesia and its implementation. The collection development policy of main library of State Islamic University Syarif Hidayatullah at Jakarta in 2008 is the object of this research. This research has done by a descriptive qualitative approach that inspects deeply by means of any deep interview, observation, and document analysis. Having examined the formulation of its collection development policy we know the context of policy's formulation, some actors who formulate, the roles of the head of the library, the attitude of the university and some values that influence. Having examined its implementation we know that the aims of the policy have achieved or not.

Key word: collection development policy, academic library, collection development

Abstrak

Dengan asumsi bahwa masih banyak perpustakaan perguruan tinggi khususnya di lingkungan Departemen Agama yang masih sulit memenuhi kebutuhan pemustaka karena manajemen koleksi atau pengembangan koleksinya belum terencana dengan baik. Tulisan ini dimaksudkan untuk mengkaji kebijakan pengembangan koleksi sebuah perpustakaan perguruan tinggi dan penerapannya agar dapat diketahui pemanfaatannya dalam manajemen perpustakaan dan koleksi. Kebijakan pengembangan koleksi yang dijadikan analisis penerapannya adalah Kebijakan Pengembangan

Koleksi Perpustakaan Utama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2008. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang mengkaji secara mendalam melalui wawancara mendalam, observasi dan analisis dokumen tentang formulasi kebijakan tersebut dan penerapannya. Dengan analisis formulasi kebijakan diketahui bagaimana konteks perumusan kebijakan, pelaku-pelaku perumus kebijakan, peran Kepala Perpustakaan, sikap lembaga induk dan nilai-nilai yang mempengaruhinya. Dengan melihat implementasinya diketahui kendala-kendala yang dihadapi. Dengan mengevaluasi implementasinya diketahui sejauhmana kebijakan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan sasaran.

Kata kunci: Kebijakan Pengembangan Koleksi, Perpustakaan Perguruan Tinggi, Pembinaan Koleksi

Pendahuluan

Perpustakaan melakukan kegiatan pengembangan koleksi melalui beberapa tahapan mulai dari pemilihan koleksi, mengadakan, mengolah serta menyiapkan koleksi, dan pada akhirnya dapat ditemukan kembali oleh pemustaka dengan mudah dan tepat. Pemustaka akan menilai perpustakaan adalah sebuah lembaga yang penting apabila kebutuhan-kebutuhan mereka dapat diperoleh dengan baik.

Menurut fungsinya perpustakaan dapat dibagi menjadi 2 kelompok besar ialah perpustakaan khusus dan umum. Perpustakaan perguruan tinggi termasuk kelompok perpustakaan khusus karena misi perpustakaan khusus ialah membantu kegiatan penelitian dan pengembangan dalam bidang yang sesuai dengan badan induk yang dilayaninya (Sulistyo, 2004, 91).

Perpustakaan perguruan tinggi harus senantiasa menyiapkan dan mengorganisasikan kebutuhan-kebutuhan sivitas akademika. Kesuksesan kegiatan pendidikan dan penelitian bergantung pada bagaimana perpustakaan dapat memberikan sumber-sumber atau bahan-bahan yang sesuai dan mencukupi maka tepat jika perpustakaan dikatakan sebagai jantungnya perguruan tinggi.

Pada prinsipnya fungsi utama perpustakaan perguruan tinggi adalah menunjang tri dharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian serta pengabdian masyarakat. Namun sayangnya masih dijumpai perpustakaan perguruan tinggi yang belum dapat memenuhi fungsinya.

Pada tahun 2007 pemerintah sudah mengeluarkan Undang-Undang Perpustakaan yang bertujuan untuk menjadikan perkembangan perpustakaan

dan kepastakawanan di Indonesia lebih baik. Bagian dari perhatian pemerintah ini selayaknya menciptakan perpustakaan ke depan lebih berkembang. Dengan perhatian yang muncul dari pemerintah, pustakawan harus bangkit menciptakan perpustakaan sesuai dengan eksistensinya dan fungsinya yang standar serta mengembangkan layanan secara kreatif dan inovatif.

Permasalahan pokok perpustakaan terletak pada pemenuhan kebutuhan pemustaka. Perpustakaan perguruan tinggi memiliki pemustaka dari kalangan sivitas akademika, yaitu dosen atau tenaga pengajar, mahasiswa, dan peneliti. Kebutuhan mereka adalah bahan pustaka yang menunjang kegiatan perkuliahan dan penelitian. Bahan pustaka yang dimaksud dapat berbentuk monograf, serial, dan digital. Perpustakaan akan dikatakan baik jika telah mampu mengatasi permasalahan pokoknya.

Untuk dapat menciptakan perpustakaan yang baik, maka dibutuhkan suatu manajemen perpustakaan yang baik pula. Sutoyo (2001, 189) dalam buku *Strategi dan Pemikiran Perpustakaan: Visi Hernandono* memaparkan bahwa manajemen perpustakaan adalah suatu proses kegiatan yang dilaksanakan perpustakaan untuk mencapai sasaran seefisien mungkin dengan mendayagunakan semua sumber daya yang ada yang meliputi sumber daya manusia, sarana, metode, serta dana.

Agar manajemen berdaya guna, tujuan dalam manajemen tersebut harus jelas sehingga perpustakaan harus ada perencanaannya. Hernandono dalam (Sutoyo 2001, 190) lebih jauh dalam pertemuan Munas Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi (FPPT) mengatakan bahwa perencanaan perpustakaan mencakup pengertian yang luas, mulai dari perencanaan dalam membangun perpustakaan baru, dalam melaksanakan tugas harian, sampai kepada pembinaan dan pengembangan perpustakaan.

Pada sebuah perguruan tinggi terdapat fakultas, jurusan, program studi, dan mata kuliah yang mana setiap mata kuliah memerlukan literatur atau bahan pustaka baik yang pokok maupun yang tambahan. Sehingga semakin banyak mata kuliah yang disajikan dalam sebuah perguruan tinggi atau universitas maka semakin banyak pula bahan pustaka yang menjadi kebutuhan pemustakanya. Jika setiap mahasiswa dalam perguruan tinggi tersebut memerlukan bahan pustaka yang menunjang setiap suatu mata kuliah maka berapa banyak bahan pustaka yang harus disediakan oleh perpustakaan baik yang berbentuk monograf, serial, maupun digital.

Dengan demikian koleksi perpustakaan adalah sumber daya informasi yang dapat menyediakan bahan pustaka yang memuat berbagai informasi bagi pemustaka.

Pemenuhan kebutuhan bahan pustaka di perguruan tinggi harus diatur dengan baik melalui perencanaan strategis yang sering dikenal dengan pembinaan dan pengembangan koleksi. Jika tidak, perpustakaan sulit memenuhi kebutuhan pemustakanya.

Perencanaan pemenuhan kebutuhan pemustaka merupakan bagian dari perencanaan perpustakaan yang harus dibuat dan dilaksanakan untuk mencapai kesinambungan fungsi perpustakaan sebagai penyedia sumber daya informasi dan pendidikan.

Proses pembinaan dan pengembangan koleksi mencakup antara lain penyusunan kebijakan pengembangan koleksi, pemilihan, pengadaan, penyiangan, serta evaluasi pendayagunaan koleksi (Septiyantono, 2007, 77). Melihat dari pernyataan di atas maka kebijakan pengembangan koleksi adalah langkah awal yang menentukan dalam proses selanjutnya. Oleh karena itu peneliti berasumsi bahwa semakin baik dan lengkap kebijakan pengembangan koleksi yang dibuat maka semakin baik proses pemilihan dan pada akhirnya semakin baik kebutuhan yang disediakan oleh perpustakaan untuk pemustakanya.

Pengembangan koleksi tidak lain adalah suatu usaha untuk mencapai kondisi koleksi perpustakaan yang kuat. Sementara di Indonesia sebuah kebijakan pengembangan koleksi belum menjadi isu yang menarik untuk dikembangkan. Sehingga timbul suatu pertanyaan apakah perpustakaan perguruan tinggi di Indonesia sebagian besar sudah memiliki kebijakan pengembangan koleksi yang dikatakan sebagai langkah awal proses manajemen pembinaan dan pengembangan koleksi.

Berdasarkan pengamatan peneliti sebagai contoh Perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup bahwa dalam proses pengembangan koleksi yang dilaksanakan setiap setahun sekali masih terbatas kepada melakukan proses seleksi, pengadaan dan *stock opname*.

Dalam proses seleksi, pihak lembaga induk meminta pihak perpustakaan mendaftar bahan pustaka yang akan diadakan atau dibeli untuk satu tahun ke depan. Selanjutnya pustakawan mendaftar bahan pustaka yang akan dibeli secara langsung sesuai dengan besar anggaran atau jumlah judul maupun eksemplar pada saat itu tanpa menggunakan pedoman kebijakan tertulis yang dibuat sebelumnya. Setelah daftar bahan pustaka dibuat, maka

bahan pustaka yang terseleksi tersebut akan dibeli oleh rekanan yang diatur dengan peraturan tertentu.

Kebijakan yang dibuat dan ditetapkan hanya meliputi kepanitiaan pengadaan dan besar anggaran sedangkan kebijaksanaan mengenai kekuatan dan jenis koleksi masih belum dianggap penting. Hal ini berimbas pada jenis bahan pustaka yang akan dibeli belum tentu merupakan kebutuhan pemustaka (sivitas akademika) dan akhirnya proses pencapaian keadaan koleksi yang ideal, kuat dan sebagai kebutuhan akan mengalami kegagalan.

Dengan keadaan atau fenomena seperti ini peneliti tertarik untuk mencari tahu pola kebijakan pengembangan koleksi dan pemanfaatannya dalam kegiatan pemenuhan kebutuhan pemustaka di perpustakaan perguruan tinggi dengan melihat penerapannya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana kebijakan pengembangan koleksi yang dirumuskan untuk kepentingan perpustakaan perguruan tinggi dan bagaimana pemanfaatan kebijakan pengembangan koleksi bagi perpustakaan perguruan tinggi.

Pembahasan

Penelitian mengenai kebijakan pengembangan koleksi dan pemanfaatannya di perpustakaan perguruan tinggi (analisis penerapan kebijakan pengembangan koleksi perpustakaan utama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) dalam upaya untuk mengetahui bagaimana kebijakan pengembangan koleksi yang dirumuskan untuk kepentingan perpustakaan perguruan tinggi dan bagaimana pemanfaatan kebijakan pengembangan koleksi bagi perpustakaan perguruan tinggi akan membahas beberapa kajian yaitu kebijakan pengembangan koleksi, fungsi kebijakan pengembangan koleksi, implementasi kebijakan pengembangan koleksi perpustakaan utama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2008, hasil interpretasi terhadap reduksi hasil wawancara tentang kecenderungan pelaksanaan kebijakan, dan evaluasi implementasi kebijakan pengembangan koleksi perpustakaan utama uin Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2008.

Kebijakan Pengembangan Koleksi

Perpustakaan perguruan tinggi akan selalu memperhatikan koleksi yang dimilikinya, apakah sudah cukup memenuhi kebutuhan pemustaka dari kalangan sivitas akademika atau masih banyak penambahan-penambahan koleksinya. Pada keadaan yang wajar, perpustakaan akan selalu membutuhkan pengembangan koleksinya. Hal ini menurut Jordan (1998, 6) dipengaruhi oleh beberapa aspek antara lain penambahan jumlah mahasiswa

(*growth in student number*), menurunnya anggaran perpustakaan (*a decline in library expenditure*), perubahan harga buku dan priodikal (*changes prices of books and periodicals*), perubahan kurikulum perkuliahan (*changes in course design*), perubahan metode belajar dan mengajar (*changes in teaching and learning methods*), bertambahnya fokus kebutuhan pemustaka (*increasing focus on needs of users*), menurunnya daya beli mahasiswa (*decline in student's book purchasing*), berkembangnya teknologi informasi (*development in information technology*), dan beberapa indikator lainnya.

Kegiatan pengembangan koleksi sering juga diistilahkan dengan manajemen koleksi seperti yang dipaparkan Brophy (2005, 118) sebagai berikut:

Collection management, sometimes called collection development, lies at heart of library's tasks. (The term collection management is preferred here since it emphasizes that the tasks in an ongoing and active one, involving stock replenishment, withdrawal and so on, and not simply the acquisition of new material).

Menurut Brophy di atas adakalanya manajemen koleksi lebih tepat disebut dengan pengembangan koleksi karena melihat tugas-tugas sebuah perpustakaan. Istilah manajemen koleksi cenderung kepada penekanan bahwa tugas-tugas tersebut mencakup banyak hal yang selalu aktif dan berkelanjutan termasuk penambahan koleksi, peminjaman dan lain-lain tidak hanya pengadaan material baru.

Gorman (1991, 3) memberikan kecenderungan batasan kebijakan pengembangan koleksi sebagai berikut:

A written collection development policy statement is intended " ...to clarify objectives and to facilitate coordination and cooperation, both within a library or library system and among cooperating libraries... if it is well done, it should serve as a day-to-day working tool that provides the necessary guidelines for carrying out the majority of tasks within the area of collection building.

Dengan demikian Gorman menggambarkan bahwa kebijakan pengembangan koleksi cenderung untuk mengetahui lebih jelas sasaran dan bagaimana mendukung koordinasi dan kerjasama baik secara internal maupun eksternal. Hal ini menentukan dalam membangun koleksi karena jika terlaksana dengan baik maka tugas-tugas dalam membangun koleksi secara tidak langsung akan dilaksanakan melalui sarana dan pedoman keseharian yang diperlukan.

Jenkins dan Morley (1999, 20) menggambarkan keadaan bahwa kebijakan pengembangan koleksi di perpustakaan perguruan tinggi di beberapa negara memiliki perbedaan antara tertulis dan yang tidak tertulis. Kebijakan pengembangan koleksi yang tertulis lebih merupakan strategi untuk melibatkan staf dan pada akhirnya kebijakan pengembangan koleksi dapat dipakai sebagai alat ukur keberhasilan pengembangan koleksi.

Futas (1995, 20) telah melakukan survey terhadap 357 perpustakaan negeri dan perguruan tinggi yang ada di Amerika Serikat tentang bagaimana mereka merencanakan pengembangan koleksi dengan memberikan pertanyaan:

“Do you have a collection development policy in force? If so, when was it first written? When was it last reviewed? By whom?”

Hasil survei hanya 3 perpustakaan yang memilih tidak menjawab pertanyaan ini, selebihnya 72% menjawab ya, dan ada 28% perpustakaan yang belum memiliki kebijakan pengembangan koleksi hingga tahun 1993. Dari 28% tersebut kelompok perpustakaan perguruan tinggi yang tidak memiliki kebijakan pengembangan koleksi yang terbesar dari swasta yakni 79% dan 21% dari perpustakaan perguruan tinggi negeri. Sejumlah pustakawan yang ditanya menjawab bahwa mereka tidak memiliki kebijakan pengembangan koleksi akan tetapi pernah mengembangkan kebijakan semacam itu dan bahkan ada yang menjawab dulu mereka punya tetapi sekarang tidak lagi. Pada perpustakaan perguruan tinggi, kebijakan tersebut biasanya dievaluasi oleh pustakawan dan beberapa saja yang dilakukan oleh kepanitiaan fakultas. Mengenai masa mengevaluasi kebijakan sejumlah perpustakaan melakukan tiap tahun atau 3-5 tahun sekali dan bahkan ada yang menjawab lebih lama lagi atau jika kebijakan tersebut memang perlu diperbaharui. Dari gambaran data di atas dapat disimpulkan bahwa tahun 1993 di Amerika Serikat perpustakaan perguruan tingginya sudah menganggap penting sebuah kebijakan tertulis.

Evans (2005, 70) dalam bukunya *Developing Library and Information Center Collections* menuangkan pentingnya memiliki “kebijakan pengembangan koleksi” khususnya secara tertulis.

Why have a collection development policy?

Hundreds of libraries and information centers have no written policy and yet have sound collections. Luck plays a strong role in having a sound (much less an excellent) collection without also having a written policy – that is, the luck of having had individuals charged with the

responsibility of building the collection who were highly intelligent and motivated by a deep commitment to the library and its collections.

Di atas Evans menggambarkan ratusan perpustakaan dan pusat informasi belum memiliki kebijakan koleksi. Faktor yang membuat pengembangan koleksi berjalan tanpa sebuah kebijakan adalah karena penanggungjawab pengembangan koleksi tersebut adalah orang yang memiliki kapasitas yang baik dan motivasi yang tinggi terhadap komitmen perkembangan koleksinya. Meskipun demikian pengembangan koleksi perpustakaan tersebut akan jauh dari pencapaian yang terbaik.

Evans (2005, 51) mendefinisikan pengembangan koleksi sebagai pernyataan tertulis dari perencanaan kegiatan dan informasi yang digunakan untuk memberikan pedoman bagi staf perpustakaan dalam berfikir dan pengambilan keputusan dalam pengadaan koleksi dan jumlah koleksi tiap subjek. Selanjutnya Evans (2005, 8) membagi proses pengembangan koleksi dalam beberapa kegiatan utama yaitu : 1). Analisis pemustaka; merupakan langkah pertama yang dilakukan dalam menentukan kebijakan pengembangan koleksi dengan tujuan untuk menilai atau menganalisa berbagai kebutuhan masyarakat pemustaka. Dengan melakukan kegiatan analisis ini kebutuhan pemustaka dapat diketahui secara rinci, 2) Kebijakan seleksi; setelah melakukan analisa pemustaka, maka hasil dari analisa tersebut dijadikan pedoman atau kebijakan dalam menyeleksi koleksi perpustakaan, 3). Proses seleksi; kebijakan seleksi yang telah disusun kemudian digunakan pada tahap kegiatan seleksi, 4). Proses pengadaan; hasil seleksi berupa daftar data koleksi yang telah terpilih selanjutnya dibawa ke bagian pengadaan dengan tujuan untuk mengadakan bahan perpustakaan yang dilakukan baik melalui pembelian, hadiah atau tukar menukar, 5) Proses penyiangan; koleksi yang ada, pada masa tertentu akan mengalami penyiangan karena informasi koleksi yang sudah tidak relevan lagi dengan kebutuhan pemustaka, 6) Proses evaluasi; hasil penyiangan dijadikan bahan untuk evaluasi dalam pemanfaatan koleksi perpustakaan. Kegiatan evaluasi ini dijadikan sebagai bahan untuk menganalisa kebutuhan masyarakat pemustaka pada tahap kegiatan pengembangan koleksi selanjutnya.

Fungsi Kebijakan Pengembangan Koleksi

Kebijakan pengembangan koleksi dibuat didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada satu perpustakaan pun yang dapat mengoleksi semua informasi atau bahan pustaka yang ada dan berkembang saat ini. Perpustakaan tentunya punya keterbatasan-keterbatasan seperti keterbatasan dana, sarana dan prasarana, sumber daya manusia dan sebagainya. Disamping

tuntutan agar koleksi yang dimiliki benar-benar berkualitas dan memenuhi permintaan pemustaka.

Oleh karena itu agar segala sumberdaya yang tersedia (terutama sekali pendanaan) dapat efektif dan efisien, maka perlu dibuat sebuah kebijakan pengembangan koleksi yang bisa berfungsi sebagai pedoman, perencanaan dan sarana komunikasi. Sebagai pedoman berarti kebijakan ini memberikan pedoman bagi semua pihak yang terlibat dalam kegiatan pengembangan koleksi sehingga ketaatan dalam proses seleksi dan deseleksi terjamin, koleksi yang responsif dan seimbang terbentuk serta dana dapat dimanfaatkan sebijaksana mungkin, sebagai perencanaan berarti kebijakan ini bisa menjelaskan koleksi yang telah ada dan rencana pengembangan ke depan juga diharapkan dapat memberikan deskripsi yang sistematis tentang strategi pengelolaan dan pengembangan koleksi yang diterapkan perpustakaan perguruan tinggi dan nantinya dapat dijadikan tolak ukur untuk menilai sejauh mana tujuan dan sasaran perpustakaan telah tercapai. Sebagai sarana komunikasi berarti dapat memberikan informasi yang benar kepada pihak-pihak yang terkait sehingga diharapkan mereka dapat berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan koleksi ini.

Dengan asumsi dan fungsi yang dikemukakan di atas, kebijakan pengembangan koleksi tertulis mutlak harus didesain sesuai dengan visi dan misi perpustakaan, sehingga diharapkan koleksi yang dimiliki benar-benar berkualitas dan dapat memberikan pelayanan yang memuaskan bagi pemustaka.

Ada beberapa tujuan perpustakaan perguruan tinggi yang ingin dicapai dengan keberadaan kebijakan pengembangan koleksi tertulis, yaitu :

- Membangun koleksi yang berkualitas, rasional, sistematis dan terarah, komprehensif serta sesuai dengan kebutuhan pemustaka.
- Mempersiapkan dan mengadakan sumber-sumber informasi yang diperlukan untuk menunjang program tridharma, dalam hal ini koleksi dapat diharapkan dapat menunjang kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.
- Mengumpulkan dan mengorganisasikan semua bahan penting.
- Dapat memberikan layanan prima dan berkualitas sehingga pemustaka dapat terpuaskan.

Sedangkan fungsi kebijakan pengembangan koleksi tertulis menurut Saepudin (2009, 6) adalah 1). Pedoman bagi selektor, 2). Sarana

komunikasi: memberitahu pemustaka mengenai cakupan dan ciri-ciri koleksi yang telah ada dan rencana pengembangannya, 3). Sarana perencanaan baik perencanaan anggaran maupun pengembangan koleksi, 4). Membantu menetapkan metode penilaian bahan, 5). Membantu memilih metode pengadaan, 6). Membantu menghadapi masalah sensor, 7). Membantu perencanaan kerjasama, dan 8). Membantu identifikasi bahan yang perlu dipindahkan ke gudang atau dikeluarkan dari koleksi (evaluasi).

Secara ringkas pada garis besarnya Gorman dan Howes (1991) memaparkan bahwa kebijakan pengembangan koleksi memiliki 3 fungsi yaitu fungsi perencanaan, fungsi komunikasi eksternal, dan fungsi komunikasi internal. Fungsi Perencanaan, Perencanaan merupakan bagian dari fungsi kebijakan pengembangan koleksi untuk mencari, mengidentifikasi dan mengembangkan koleksi yang dibutuhkan pemustaka. Melalui kebijakan pengembangan koleksi, perpustakaan mempunyai kepastian prioritas yang akan dilakukan untuk mengalokasikan dana dan pemenuhan kebutuhan seluruh masyarakat pemustaka. Fungsi Komunikasi Eksternal, Selain fungsi perencanaan, kebijakan pengembangan koleksi memiliki fungsi komunikasi. Kebijakan pengembangan koleksi menginformasikan kepada perpustakaan-perpustakaan lain jika mungkin koleksi yang akan dikembangkan. Komunikasi antara perpustakaan ini terjadi jika antara perpustakaan tersebut terjalin kerjasama. Hal ini juga dilakukan dengan kaitan pendanaan. Fungsi Komunikasi Internal, Kebijakan pengembangan koleksi tidak hanya dapat mengkomunikasikan rencana pengembangan koleksinya kepada perpustakaan lain tetapi juga kepada masyarakat di dalam institusi di mana perpustakaan itu berada.

Ada kepentingan mengkomunikasikan perencanaan pengembangan koleksi dengan komunitasnya; pemustaka, staf, dan administrator. Bentuk komunikasi ini akan terus berlanjut dengan berkembangnya kebutuhan pemustaka dan anggaran yang disediakan atau akan disediakan.

Implementasi Kebijakan Pengembangan Koleksi Perpustakaan Utama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2008

Berdasarkan beberapa masalah yang mempengaruhi kebijakan di atas maka permasalahan yang akan dilihat pada penerapan Kebijakan Pengembangan Koleksi Perpustakaan Utama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2008 adalah 1) tahap-tahap pengembangan organisasi dalam hal ini adalah tahap-tahap atau kegiatan-kegiatan pengembangan koleksi yang meliputi penganggaran, seleksi, pengadaan, penyiangan dan evaluasi koleksi, 2) jenis struktur organisasi yaitu karakteristik pelaksana kebijakan

tentang kegiatan pengembangan koleksi yang meliputi tanggung jawab dan kerja sama antar bagian-bagian organisasi. Selanjutnya akan dilihat 3) kecenderungan pelaksanaan kebijakan dan 4) kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kebijakan yang ada.

Beberapa kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan kebijakan dapat dihimpun mulai dari apa yang disampaikan oleh Kepala Perpustakaan sebagai berikut : “Memang sejauh ini fakultas mempunyai kepentingan yang berbeda-beda sehingga sulit untuk diseragamkan. Kalau berikutnya dipandang perlu disatukan seluruhnya kebijakan pengembangan koleksi misalnya dengan pihak fakultas itu perlu SK Rektor. Kalau sebatas saya sebagai kepala perpustakaan tidak bisa masuk ke fakultas. Masalahnya sekarang kebijakan tersebut belum tersosialisasi dengan baik.”

Sementara menurut Wakil Kepala Perpustakaan kendala yang dirasakan adalah : “Kegiatan kita sehari-hari sudah cukup melelahkan. Kita lihat pengunjungnya paling tidak sehari 1000-1500 tapi saya lihat sekarang...luar biasa. Karena umumnya kita ini tidak memiliki tenaga khusus *bibliographer*. Yang dia sepanjang hari dan sepanjang tahun meng-*update* data bibliografi yang kemudian akan diacu menjadi kebutuhan pengadaan. Kita tidak yang ada petugas pengadaan, nah bagian tugas pengadaan melakukan seleksi dan tugas melakukan seleksi itu menjadi *overload* karena melakukan banyak proses-proses administrasi jadi sebenarnya kalau ada khusus tenaga *bibliographer* mungkin efektif sekali, kualitas pengadaan akan semakin bagus.”

Kepala Sub-Bagian Teknis melihat kendala yang dihadapi adalah bagaimana anggaran yang dialokasikan dapat menyesuaikan kebutuhan Perpustakaan Utama dan perpustakaan-perpustakaan lain di fakultas sehingga akan tercapai keseimbangan. Seperti yang dinyatakannya berikut : “Sistem Perpustakaan disini desentralisasi, setiap fakultas memiliki Perpustakaan dengan anggarannya masing-masing. Tetapi kondisi setiap Perpustakaan tersebut sangat bervariasi ada yang cukup koleksi dan anggarannya, ada yang kurang koleksi maupun anggarannya. Nah untuk menyeimbangkan koleksi Perpustakaan kami ingin ada subsidi silang antara fakultas, tetapi ini rasanya sulit dicapai.”

Kepala Urusan Pengadaan merasakan bahwa sifat struktur organisasi Perpustakaan Utama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Tanggung jawab yang tersebar yaitu urusan pengadaan, urusan pemeliharaan dan urusan pengembangan dan kerjasama mengakibatkan pelaksanaan kebijakan akan dilakukan berdasarkan

interpretasi masing-masing. Keadaan seperti ini akan menyebabkan disefisien dan disefektif terhadap pengembangan koleksi.

Keadaan seperti ini diceritakan oleh Kepala Urusan Pengadaan sebagai berikut : “O...ya pernah waktu saya menentukan prioritas bahan pustaka yang diseleksi. Setelah saya usulkan ada perbedaan pendapat sehingga kami harus bermusyawarah lagi menentukan prioritas tersebut. Jadi kan memakan waktu. Ya...berkaitan dengan jenisnya, juga bahasanya dan lain-lain.”

Sementara Kepala Urusan Pemeliharaan menyampaikan keluhannya dalam kegiatan pemeliharaan dan penyiangan sebagai berikut : “Ya seperti tadi. Kurangnya tenaga ahli, anggaran dan peralatan. Saya kira ya”.

Dengan demikian kendala-kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan kebijakan antara lain kebijakan tersebut belum tersosialisasi dengan baik, belum memiliki tenaga khusus *bibliographer* untuk kegiatan evaluasi, kondisi setiap perpustakaan tersebut sangat bervariasi sehingga untuk menyeimbangkan koleksi Perpustakaan Utama perlu subsidi silang, untuk kegiatan seleksi masih belum ada penentuan prioritas bahan pustaka yang akan dikembangkan sehingga masih sulit untuk memutuskan, dan bagi urusan pemeliharaan dan penyiangan dirasakan kurangnya tenaga ahli, anggaran dan peralatan.

Hasil Interpretasi terhadap Reduksi Hasil Wawancara tentang Kecenderungan Pelaksanaan Kebijakan

Pertanyaan : 1	Apakah pelaksanaan seleksi, pengadaan, penyiangan, dan evaluasi berdasarkan kebijakan yang telah dibuat?		
	Hasil Wawancara	Interpretasi	Inisial
KPK/P.1/Wan/Info.1	Ya. Harapan saya seperti itu.	Ya	MD
KPK/P.1/Wan/Info.2	Pada dasarnya kegiatan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan yang dibuat.	Ya	NY
KPK/P.1/Wan/Info.3	Dalam prakteknya demikian.	Ya	SM
Pertanyaan : 2	Apakah pelaksanaan kebijakan ini memberikan dampak positif bagi pelayanan dan manajemen perpustakaan? Dapatkah Bapak ceritakan sedikit?		
KPK/P.3/Wan/Info.1	Hasil Wawancara	Interpretasi	Inisial
	Seperti yang saya katakan tadi kebijakan sangat membantu dalam pelaksanaan pengembangan koleksi. Kita tau ke arah mana koleksi yang akan dikembangkan. Juga ketika ada pergantian petugas mungkin.	Dampaknya positif	MD
KPK/P.3/Wan/Info.2	Saya harapkan demikian ya. Dengan pedoman tentunya pekerjaan akan dilakukan lebih baik.	Dampaknya positif	NY

KPK/P.3/Wan/Info.3	Wah ini pertanyaan susah dijawab, tetapi kan begini, bahwa ini masih dalam pengembangan (meskipun dalam praktek sudah menjadi acuan) jadi belum bisa dilihat dampaknya.	Belum bisa dilihat dampaknya	SM
Pertanyaan : 3	Apakah kebijakan pengembangan koleksi tertulis tahun 2008 membantu dalam pelaksanaan seleksi dan pengadaan? Mengapa?		
KPK/P.8/Wan/Info.4	<p>Hasil Wawancara</p> <p>O...jelas la. Justru kebijakan itulah menjadi acuan kita supaya kita tidak apa namanya...agar kita fokus apa yang akan kita kembangkan. Untuk menghindari kerja yang berulang-ulang. Itu yang saya sampaikan sewaktu ada raker kemudian dibuatlah semacam kebijakan ini. Jadi sebenarnya itu yang saya rasakan sebagai hambatan. Sewaktu saya terlibat pengadaan, saya memasukkan prioritas menurut pandangan saya. Yang terjadi usulan tersebut berulang-ulang dibenahi. Ya... karena belum ada kebijakan tersebut. Saya juga mengawatirkan jika tidak ada kebijakan terjadi <i>overlapping</i> koleksi.</p>	<p>Interpretasi</p> <p>Ya, membantu</p>	<p>Inisial</p> <p>UA</p>
Pertanyaan : 4	Menurut Ibu haruskah kebijakan tersebut mencakup teknik seleksi secara lebih lengkap? Mengapa?		
KPK/P.13/Wan/Info.4	<p>Hasil Wawancara</p> <p>Tentunya ya. Karena kita menangani proses yang cukup rumit.</p>	<p>Interpretasi</p> <p>Ya seharusnya</p>	<p>Inisial</p> <p>UA</p>
Pertanyaan : 5	Apakah pelaksanaan penyiangan berdasarkan kebijakan yang telah dibuat?		
KPK/P.35/Wan/Info.5	<p>Hasil Wawancara</p> <p>Saya kira ya. Paling dari kita-kita juga sewaktu ada raker.</p>	<p>Interpretasi</p> <p>Ya</p>	<p>Inisial</p> <p>NL</p>
Pertanyaan : 6	Apakah ada perubahan yang harus dilakukan dalam keadaan tertentu di luar kebijakan tertulis yang telah dibuat? Mengapa?		
KPK/P.47/Wan/Info.5	<p>Hasil Wawancara</p> <p>Seharusnya ada ya. Karena banyak yang kami butuhkan belum terpikirkan misalnya peralatan, juga tenaga-tenaga yang ahli.</p>	<p>Interpretasi</p> <p>Hendaknya ada perbaikan kebijakan</p>	<p>Inisial</p> <p>NL</p>

Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengembangan Koleksi Perpustakaan Utama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2008

Tidak ada batasan waktu yang pasti kapan sebuah kebijakan harus dievaluasi. Hanya untuk mengetahui dampak suatu kebijakan sudah tentu

diperlukan waktu yang cukup semenjak kebijakan tersebut diimplementasikan. Semakin strategis suatu kebijakan maka diperlukan tenggang waktu yang lebih panjang. Sebaliknya semakin teknis sifat dari suatu kebijakan maka evaluasi dapat dilakukan dalam kurun waktu yang lebih cepat.

Winarno (2002, 27) menyebutkan, dalam pembuatan kebijakan publik, tahap-tahap yang dilaluinya adalah : 1). Tahap penyusunan agenda. Masalah-masalah akan berkompetisi dahulu sebelum dimasukkan ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada saat itu, suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali dan beberapa yang lain pembahasan masalah tersebut ditunda untuk waktu yang lama. Tahap penyusunan agenda merupakan tahap yang akan menentukan apakah suatu masalah akan dibahas menjadi kebijakan atau sebaliknya, 2). Tahap formulasi kebijakan. Masalah yang masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tersebut didefinisikan untuk kemudian dicari alternatif pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif yang ada. Dalam tahap perumusan kebijakan ini, masing-masing alternatif akan bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Pada tahap ini, masing-masing aktor akan “bermain” untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik. Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan pengadilan. 3). Tahap implementasi kebijakan. Suatu program hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika tidak diimplementasikan. Pada tahap ini, berbagai kepentingan akan saling bersaing, beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan dari para pelaksana, namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana. 4). Tahap penilaian kebijakan. Pada tahap ini, kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Oleh karena itu, maka ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.

Pada tahun pertama dan kedua penerapan Kebijakan Pengembangan Koleksi Perpustakaan Utama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2008 dirasakan belum banyak bermanfaat bagi pelaku pengembangan koleksi sebagai implementor. Seperti dijelaskan oleh Kepala Urusan Pengadaan, bahwa proses seleksi selama ini dilakukan seperti biasa tidak melihat kepada

kebijakan dan sebenarnya apa yang dilakukan telah sesuai dengan kebijakan yang dibuat. Hanya saja dalam menentukan besaran anggaran untuk penekanan pada beberapa disiplin ilmu atau beberapa jenis bahan pustaka ditentukan melalui rapat pimpinan yang tidak diatur di dalam kebijakan. Sesungguhnya yang diharapkan oleh Kepala Urusan Pengadaan adalah arah pengembangan koleksi yang akan dicapai oleh Perpustakaan Utama UIN Syarif Hidayatullah yang lebih jelas. Muatan kebijakan yang ada menunjukkan mekanisme kerja proses seleksi secara umum dan biasa dilakukan selama ini.

Dari gambaran kondisi seperti ini, peneliti melihat ada kebijakan yang bersifat strategis yang membutuhkan penerjemahan lebih lanjut oleh implementor dan ada kebijakan yang bersifat teknis yang langsung dilakukan oleh implementor.

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat tingkat kinerja suatu kebijakan, sejauh mana kebijakan tersebut mencapai sasaran dan tujuannya.

Kesimpulan

Dari pemaparan konsep mengenai kebijakan pengembangan koleksi maka ada beberapa tahapan penting yang menjadi prinsip dalam perumusan kebijakan pengembangan koleksi yaitu 1). *analyse community needs*, 2). *circulate the draft document*, 3). *adopt the revised document*” dan 4). *”provide for ongoing review”*. Pada proses yang dilakukan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2008, elemen-elemen yang tertuang di dalamnya belum diberikan secara lengkap dan rinci. Perlu adanya keterlibatan dari beberapa pihak yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan sivitas akademika akan sumber daya informasi (koleksi). Konteks pembuatan kebijakan adalah karena tuntutan visi perguruan tinggi dan untuk memenuhi fungsinya dalam pengembangan koleksi yaitu fungsi perencanaan, fungsi komunikasi eksternal, dan fungsi komunikasi internal. Diperlukan tim dalam perumusannya. Sistem penganggaran dituangkan dengan jelas di dalam kebijakan. Pada proses seleksi, kebijakan yang dibuat memuat pedoman seleksi secara teknis dan senantiasa dilakukan evaluasi koleksi yang mencerminkan kebutuhan pemustaka. Aturan yang dibuat dalam kebijakan mengenai pengadaan harus jelas tidak hanya bersifat strategis. Kebijakan juga mengatur proses penyiangan agar menjadi lebih efektif dan efisien. Karakteristik struktur pelaksana Kebijakan Pengembangan Koleksi Perpustakaan Perguruan Tinggi seyogyanya memberikan kesempatan dan dukungan yang baik terhadap pelaksanaan kebijakan.

Kegiatan pengembangan koleksi di Perpustakaan Utama telah dilakukan semenjak berdirinya perpustakaan itu sendiri. Secara tidak langsung prosedur seleksi, pengadaan, penyiangan, pemeliharaan, dan evaluasi koleksi sudah berjalan. Perkembangan kualitas kegiatan pengembangan koleksi semakin baik seiring dengan pengalaman pelaku pengembangan koleksi dan sumber daya manusia yang berkompeten bertambah di bagian tersebut.

Untuk dapat melihat signifikansi kebijakan bagi pelaksana maka dilihat dari hasil penilaian terhadap implementasinya di atas dapat dikatakan sebagai berikut :

Bagi Kepala Perpustakaan, maka kebijakan pengembangan koleksi sangat diperlukan oleh seorang Kepala Perpustakaan sebagai sarana koordinasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengembangan koleksi yang dilakukan di Perpustakaan Utama. Adapun untuk memenuhi sasaran kebijakan tersebut masih diperlukan peninjauan ulang terhadap kebijakan tahun 2008 karena masih dijumpai kebijakan yang tidak terlaksana dan belum tertuang. Bagi pimpinan perpustakaan, kebijakan yang dibuat dapat membantu mengkoordinasikan dan mengarahkan pelaksanaan pengembangan koleksi. Sehingga diharapkan kegiatan ini dapat berjalan dengan arah yang jelas.

Bagi bagian pengadaan, kegiatan rutin tersebut dapat dilalui dengan atau tanpa kebijakan yang ditentukan oleh pihak pembuat kebijakan. Meskipun demikian sebagai pedoman kegiatan pengembangan koleksi, kebijakan tersebut dirasakan sangat perlu di bagian ini. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Kepala Urusan Pengadaan ketika ia harus memilih jenis bahan pustaka yang ada pada sarana pemilihan seperti katalog penerbit, *on-line* katalog, bibliografi subyek, usulan pemustaka, dan lain sebagainya untuk dijadikan daftar bahan pustaka untuk pengadaan. Ia melihat bahan pustaka seperti apa yang menjadi prioritas. Kegiatan mengevaluasi koleksi dilakukan oleh petugas ketika pimpinan ingin mengetahui perkembangan koleksi yang sudah ada. Kebijakan yang dibuat tidak banyak memberikan arahan yang lebih jelas sehingga hasil evaluasi dituangkan secara umum. Keadaan seperti ini dapat menimbulkan pengukuran yang kurang tepat.

Bagi bagian pemeliharaan, kegiatan penyiangan selama ini dilakukan dengan pertimbangan secara umum seperti ketika koleksi yang ada dilihat sudah rusak berat dan tak mungkin diperbaiki sedangkan koleksi tersebut tak pernah digunakan pemustaka. Atau koleksi yang memang tidak dibutuhkan oleh pemustaka. Dengan kebijakan yang dibuat, petugas mempunyai ukuran

yang jelas koleksi seperti apa yang harus disingkirkan. Dengan kejelasan ini kegiatan penyiangan dapat dilakukan lebih efektif dan efisien.

Daftar Rujukan

- Brophy, Peter. (2005). *The Academic Library*, London : Facet.
- Evans, G. Edward. (2005). *Developing Library and Information Center Collections*, Westport : Libraries Unlimited.
- Futas, Elizabeth. (1995). *Collection Development Policies and Procedures*, Arizona : The Oryz Press.
- Gorman, G.E. dan Howes, B.R. (1991). *Collection Development for Libraries*, London : Bowker-Saur.
- Jenkins, Clare dan Morley, Mary. (1999). *Collection Management in Academic Libraries*, Hampshire : Gower
- Jordan, Peter. (1998). *The Academic Library and Its Users*, Hampshire : Gower.
- Lasa. (2005). *Manajemen Perpustakaan*, Yogyakarta : Gama Media.
- Saepudin, Encang. (24 April 2009). "Kebijakan Seleksi Guna Mendukung Kegiatan Pengembangan Koleksi", 3 Juni 2009
- Septiyantono, Tri. (2007). *Dasar-dasar Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, Yogyakarta : Fakultas Adab,
- Sulistyo-Basuki. (2006). *Metode Penelitian*, Depok : Wedatama Widya Sastra
- Sutoyo, Agus. (2001). *Strategi dan Pemikiran dan Perpustakaan Visi Hernandono*, Jakarta : Sagung Seto.
- Winarno, Budi. (2002) *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta : Media Pressindo.
- Zuhdi, Muhammad, et. al. (2008). *Pedoman Penggunaan Perpustakaan Utama UIN Syarif Hidayatullah*, Jakarta : Perpustakaan Utama Press.
- _____. (2008). *Kebijakan Pengembangan Koleksi*, Jakarta : Perpustakaan Utama Press.